

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan kesehatan lingkungan merupakan bagian integral dalam sistem pembangunan kesehatan dan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan faktor penentu (determinan) dalam kesejahteraan manusia. Dan hal itu merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Merujuk pada undang – undang nomor 36 tahun 2009. Pasal 3 menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. (Mughtar, dkk. 2016)

Dewasa ini orientasi pembangunan kita nampaknya belum berorientasi dan menyentuh secara langsung terhadap persoalan dan penyelesaian dampak dari pembangunan yang dilaksanakan terhadap kesehatan baik dalam kesehatan manusia maupun kesehatan lingkungan. Padahal ditinjau dari prespektif kebijakan pembangunan nasional di indonesia kesehatan lingkungan merupakan hak asasi manusia dari salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan.

Permasalahan krusial dalam dimensi kesehatan lingkungan pada umumnya adalah masih rendahnya jangkauan program kebijakan karena keterbatasan berbagai sumber daya yang tersedia, sehingga tingkat proteksi terhadap resiko penyakit berbasis lingkungan juga masih rendah. Adapun yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum, sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula (Notoatmodjo, 2002).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan adalah persoalan sampah baik itu sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, maupun sampah industri (padat, cair). Berdasarkan istilah lingkungan untuk *menejemen sampah* adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang berkaitan dengan sampah manusia (*human waste*) sesuatu yang berasal dari hasil – hasil pencernaan manusia misalnya urine, tinja. Apabila sampah ini tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat menularkan penyakit (ECOLINK,1996).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa setiap hari manusia membuang kotoran dari tubuhnya (*Human Waste*) semakain tinggi tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk suatu wilayah semakin tinggi pula limbah yang dihasilkan setiap hari dan semakin menimbulkan dampak terhadap pencemaran dan kesehatan lingkungan. Apalagi membuang limbah secara langsung ke badan air penerima, dapat menimbulkan pencemaran dan berbagai penyakit yang berbahaya.

Penanggulangan pencemaran dan penularan penyakit akibat sampah manusia (lumpur tinja) tersebut dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan cara itu adalah dengan melakukan penanganan pembuangan lumpur tinja yang mampu menampung serta mengolah tinja sedemikian rupa sesuai dengan persyaratan teknis, ekonomis, dan berwawasan lingkungan yang dimulai dari penampungan tinja pada setiap rumah, penguraian sampah, pengolahan akhir di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Pentingnya pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) tidak hanya terbatas sampai pada tingkat bangunan lumpur tinja saja, namun lebih dari itu kegunaannya dapat menampung dan mengolah lumpur tinja tersebut agar tidak dapat menimbulkan masalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan, mengantisipasi dampak yang lebih buruk akibat adanya peningkatan volume lumpur dan sekaligus sebagai upaya penanganan masalah lumpur tinja yang lebih efektif dan higienis (multiguna).

Dalam kaitannya dengan masalah lumpur tinja di Kecamatan Tenggarong. Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara baru dalam tahapan persiapan penyusunan strategi pembangunan sanitasi lingkungan salah satunya pembuatan IPLT , sedangkan penanganan lumpur tinja selama ini menggunakan mobilitas truck penyedot tinja yang hanya melayani wilayah perkotaan. Padahal kondisi sebenarnya mengharuskan dengan segera adanya IPLT ini. Seiring dengan meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk, pusat pemerintahan serta daerah wisata dan budaya, dan dari sisi pembiayaan sangat memungkinkan membangun instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai mana yang telah dikemukakan diatas nampaknya bahwa masalah lumpur tinja merupakan masalah serius bagi kesehatan lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama. Untuk itu dapatlah dirumuskan pokok permasalahannya bahwa dalam mengatasi lumpur tinja agar tidak berdampak terhadap kesehatan lingkungan dapat ditangani dengan pembuatan penyediaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

1.3 Batasan Perencanaan

Ruang lingkup perencanaan ini dibatasi pada objek kajian desain dan rancang bangun instalasi pengolahan lumpur tinja untuk wilayah Kecamatan Tenggarong jelasnya batasan perencanaan yang dimaksud adalah:

1. Sumber data yang diperoleh atau digunakan untuk perencanaan ini hanya meliputi wilayah Kecamatan Tenggarong.
2. Hasil akhir perencanaan berupa desain IPLT disertai gambar, berdasarkan analisis debit lumpur tinja dan perhitungan masing – masing unit.

1.4 Maksud dan Tujuan Perencanaan

Maksud dan tujuan perencanaan ini secara umum adalah untuk menyajikan konsep pemikiran kepada pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,

khusus Kecamatan Tenggarong pentingnya IPLT dalam menangani masalah sanitasi lingkungan dan kesehatan lingkungan bagi daerah perkotaan dengan tingkat penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Adapun secara khusus untuk:

- 1) Menghitung volume lumpur tinja dari penduduk Kecamatan Tenggarong.
- 2) Menghitung volume lumpur tinja yang ditampung IPLT rencana dari seluruh volume lumpur tinja yang dihasilkan penduduk Kecamatan Tenggarong.
- 3) Membuat dan merencanakan desain IPLT untuk wilayah Kecamatan Tenggarong.

1.5 Manfaat perencanaan

1. Dapat dipakai sebagai salah satu acuan untuk perencanaan pembuatan pengolahan lumpur tinja di Kecamatan Tenggarong khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya.
2. Dapat dipakai dan dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa di tehnik lingkungan berikutnya dalam menyelesaikan tugas – tugas perkuliahannya.
3. Masukan bagi pemerintah daerah untuk percepatan perencanaan maupun pembangunan IPLT di wilayah Kecamatan Tenggarong.